



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 10 Telanaipura Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan berisikan indikatif rencana program kegiatan pada Tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun sebagai implementasi rencana pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, perlindungan masyarakat, serta pengendalian kebakaran.

Kita berharap agar Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya JAMBI MANTAP Tahun 2024.

Terima kasih.

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19661229 198512 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sistematika Penulisan.....	4
II. BAB II EVALUASI RENJA SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI TAHUN 2022	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja	5
B. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
C. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.....	26
III. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
B. Tujuan Perangkat Daerah	32
C. Program dan Kegiatan	36
IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
IV. BAB V PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis, dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya secara tentram, tertib dan teratur. Kondisi tersebut dapat diwujudkan jika semua aktivitas berjalan secara aman sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbulah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku, dan begitu pula selanjutnya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu, maka timbul rasa saling menghormati dalam keteraturan.

Ketentraman dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Proses perencanaan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan. Apabila perencanaan dilaksanakan dengan baik, maka pencapaian tujuan yang dicita-citakan terdapat peluang lebih besar kemungkinan untuk mewujudkannya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya

didukung dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024, merupakan rencana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran untuk mendukung terwujudnya JAMBI MANTAP 2024, dan dalam penyusunannya memperhatikan kebijakan pemerintah.

B. Landasan hukum penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi;

C. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju yang disusun dalam Rancangan Akhir Renja dengan Renstra. Sedangkan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi yang termuat dalam Visi Terwujudnya Jambi **MANTAP** (JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH LINDUNGAN ALLAH SWT) yang untuk mewujudkannya telah dirumuskan 3 misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-goverment yang terintegrasi;
2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemamfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan;
3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia, yaitu melakukan langkah – langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif. berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mencakup :

BAB. I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 dan Capaian Resntra

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

II.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP DAN DAMKAR PROV JAMBI

III.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

III.2. Tujuan dan sasaran Renja Satpol PP

III.3. Program dan kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI

BAB. V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 dan Capaian Renstra.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan ketentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi adalah menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 dan realisasi Renstra sebagaimana tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel 1.1 (T-C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Jambi

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar									
01.05	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat									
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	IKM	A	A	A	100	A	A	
			Predikat AKIP	B	BB	...		BB	BB	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan komponen SAKIP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	1,5
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75

1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD		4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	12 laporan	3
1.05.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		5 laporan	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	15 laporan	3,75
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		2.408 orang	2.478 org	2.450 org	100	2.478 org	7.336 org	1.834 org
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	36 dokumen	9

1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	34 dokumen	9
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	12 dokumen	3
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD.		2 laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	6 laporan	1,5
1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		180 paket	180 paket	180 paket	100	177 paket	537 paket	134,25
1.05.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75

1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Dik dan pelatihan		25 orang	25 orang	25 orang	100	25 orang	75 orang	18,75
1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	90 orang	50 orang	55,6	50 Orang	150 orang	37,5
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		4 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	12 paket	3
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	0,75
1.05.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 paket	1 paket	-	0	1 paket	2 paket	0,5
1.05.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor		1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	0,75
1.05.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	0,75
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.01.1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	-	-	0	100%	100%	
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		-	1 unit	1 unit	0	-	1 unit	0,25

1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan atau dibayarkan pajaknya.		49 Unit	49 Unit	49 Unit	100	49 Unit	147 unit	36,75
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		30 unit	25 unit	25 unit	100	30 unit	85 unit	21,25
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi		2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	6 unit	1,5
01.05.02	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100	100%	100%	
		- Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	100%	100%	100	100%	100%	
		- Cakupan petugas Satlinmas		13.109 org	17.150 org	13.109 org	74,55	17.150 org		

1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan.		100%	12 bulan	12 bulan	100	96 kasus	100%	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan		100%	12 bulan	12 bulan	100	61 kasus	100%	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas tingkat provinsi		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75

1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satpol pp Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya.		135 Orang	80 orang	80 orang	100	100 Orang	315 orang	78,75
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.		1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100	1 Laporan	3 laporan	0,75
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	Persentase pelanggar perda dan perkada yang ditegakkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.02.1.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.02.1.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai SOP		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas dan karir PPNS		3 kegiatan				3 kegiatan		

1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Dan Karir PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	0,75
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyelidikan atas pelanggaran perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan ditempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP secara operasional sudah aktif		1 paket	1 paket	1 paket	100	10 dokumen	2 paket	0,5
01.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran		100%				100%		
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah Dokumen informasi daerah (kabupaten/kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	0,75
1.05.04.1.01.02	Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi kebakaran		1 laporan	-	-	-	-	-	0,25

1.05.04.1.01.03	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	2 laporan	0,75
1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan		-	1 dokumen	1 dokumen	100	-		0,5
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti Bimtek Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota		40 org	-	-		-	40 org	10
1.05.04.1.01.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah dokumen yang memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	0,5

II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan perangkat daerah sebagai salah satu pelaksana urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Sesuai PERGUB Jambi Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 3 disebutkan bahwa “ ***Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai tugas menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran*** “.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi mempunyai ***fungsi*** sebagaimana Pasal 4 yaitu :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pengendalian kebakaran;

2. Penyusunan kebijakan penegakan perda dan perkara .
3. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
4. Penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat
5. Penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan kebakaran
6. Penyusunan koordinasi penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan kebakaran dengan kepolisian negara republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, instansi terkait dan aparaturnya.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi dan Tata Kerja :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari;
 - Seksi Operasional dan Pengendalian
 - Seksi Ketertiban Umum /Jafung Pol PP Muda Sub Koordinator Tibum
 - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah terdiri dari;
 - Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah / Jafung Pol PP Muda Sub Koordinator Penegakan Perundang-undangan Daerah
 - Seksi Hubungan antar Lembaga.
 - Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari;
 - Seksi Data dan Informasi/Jafung Muda/Sub Koordinator Data dan Informasi
 - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
 - Seksi Kewaspadaan Dini
- f. Bidang Pengendalian Kebakaran terdiri dari;
 - Seksi Pemetaan/Jafung Muda/Sub Koordinator Pemetaan
 - Seksi Pencegahan dan Penanggulangan
 - Seksi Bina Potensi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menggunakan perumusan indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang berpedoman pada Indikator Kinerja utama (IKU) dan dengan Perjanjian Kinerja serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja *Input*, *Output* dan *Outcome* antara yang direncanakan dengan realisasinya atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam kebakaran Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program / kegiatan strategik Renstra Tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja sasaran strategik beserta target realisasi dan hasil pencapaiannya melalui beberapa program antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 1.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	100	Sangat Baik
		Predikat AKIP	Indeks	BB
2.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala	Persentase gangguan tranribum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Sangat Baik
		Cakupan	orang	17.150	13.109	76,44	Tinggi

	Daerah	petugas Satlinmas					
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	100	100	100	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	82, 55	82,55	Tinggi

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran tersebut 3 (tiga) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan **(tercapai 100%)** dari total 6 (enam) indikator dengan persentase capaian sebesar 100 %, sedangkan 2 (dua) indikator belum mencapai target dan 1 (satu) indikator masih tahap penilaian.

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 76,49 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerjanya yakni ; 1) Indeks Kepuasan Masyarakat. 2) Predikat AKIP

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	100
		Predikat AKIP	BB

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 2.4 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % terutama pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai A (Kategori sangat baik),

sedangkan terhadap indikator Predikat AKIP dengan target BB masih dalam proses penilaian.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5.
Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	A	A	A	A	100
	Predikat AKIP	B	B	BB

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 2.5 diatas tergambar bahwa capaian terkait indikator Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja khususnya terkait Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya semenjak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, sedangkan indikator Predikat AKIP tahun 2020 dan 2021 tercapai sesuai target, untuk capaian Tahun 2022 masih dalam tahap penilaian.

Sasaran #2: Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerjanya yakni ; 1) Persentase gangguan tranribum yang dapat diselesaikan; 2) Cakupan petugas Satlinmas, dan 3) Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan.

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

- Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6.
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100
		Cakupan petugas Satlinmas	17.150 org	13.109 org	76,44
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100 %	100 %	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 2.6 diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah 2 (dua) indikator dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % terutama pada indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan mencapai 100 % (Kategori sangat baik), sedangkan terhadap indikator Cakupan petugas Satlinmas masih belum mencapai target.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7.
Capaian Kinerja 2021-2026

No.	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	-	100%	100 %	100 %	100
	Cakupan petugas Satlinmas	13.109 org	13.109 org	17.150 org	13.109 org	76,44
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	-	100 %	100 %	100 %	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

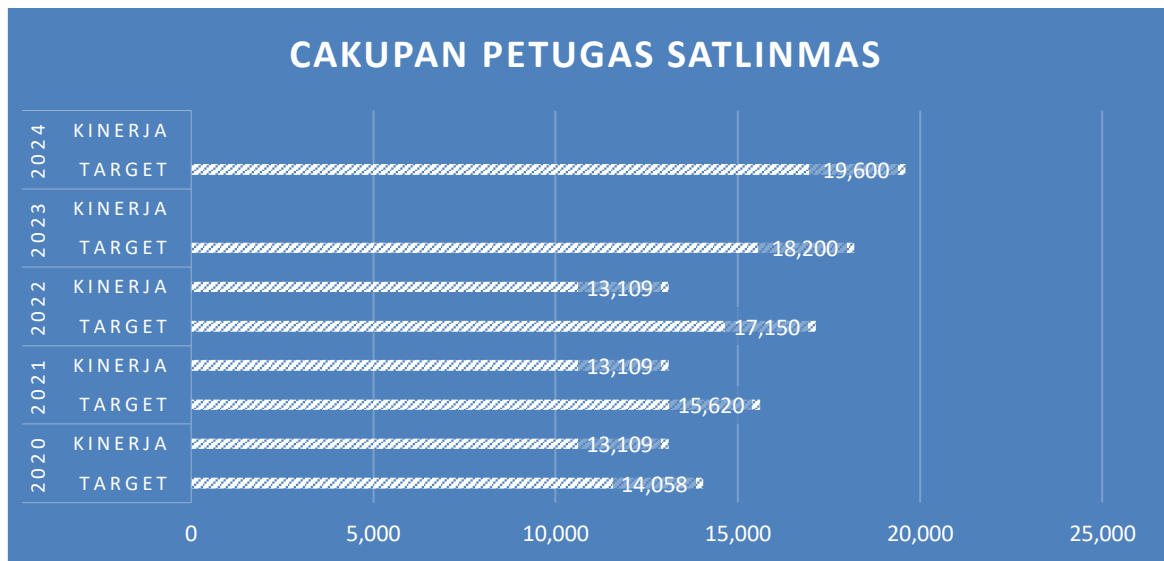
Berdasarkan tabel 3.2 di atas tergambar bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, setiap tahunnya semenjak tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, yakni 100 % terutama pada indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan mencapai 100 % (Kategori sangat baik),sedangkan terhadap indikator Cakupan petugas Satlinmas masih belum mencapai target dan cenderung mengalami penurunan.

Gambar 1.1.

Grafik Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan



Gambar 1.2.
Grafik Cakupan petugas Satlinmas



Gambar 1.3.
Grafik Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan



Sasaran #3: Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator kinerjanya Pemenuhan Tingkat

Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Sasaran ini dicapai melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8.
Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %	82,55 %	82,55

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 2.8 di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran dengan indikator Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran belum dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni 100 % .

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

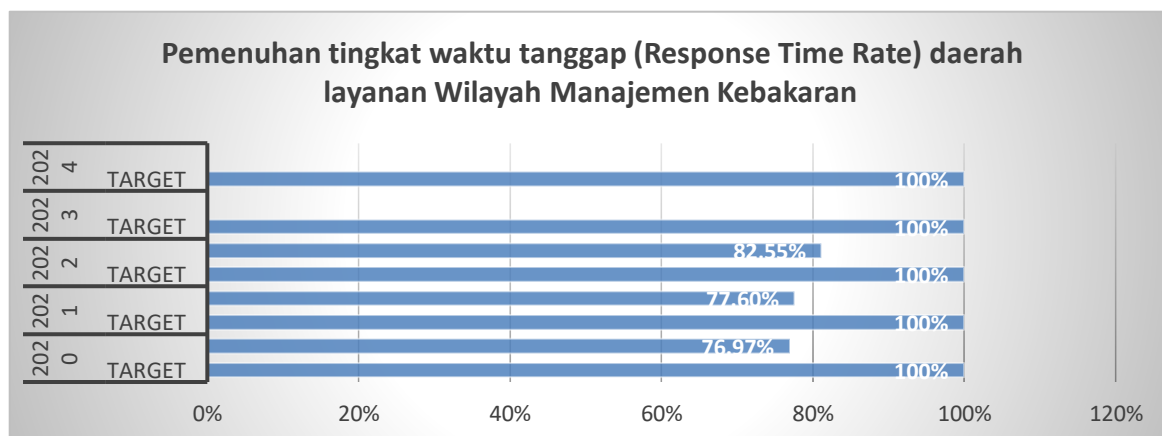
Tabel 1.9.
Capaian Kinerja 2021-2026

No .	Indikator	Capaian		Capaian 2022		
		2020	2021	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	76,97	77,60	100 %	82,55 %	816

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel 3.6 di atas tergambar bahwa capaian terkait sasaran Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran belum dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan setiap tahunnya semenjak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, namun demikian capaiannya mengalami peningkatan setian tahunnya.

Gambar 1.4.
Grafik Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).



Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.10 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Jambi**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Satpol PP dan Damkar				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat	-	-	A	A	A	A	A				
2.	Predikat AKIP	-	-	BB	BB	BB	A				
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
4.	Cakupan petugas Satlinmas	1 RT / 1 Org Linmas	-	17.1 50	18.200	19.600	22.000	13.109				
5.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100	100	100	100	100	100	100 %				
6.	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100	-	100	100	100	100	82,55 %				

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi., 2022

Berdasarkan tabel T-C.30 di atas tergambar bahwa perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi capaian terkait indikator di beberapa indikator telah mencapai target serta mengalami peningkatan, kecuali terkait indikator Cakupan Petugas Satlinmas dan Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran yang masih belum mencapai target.

II.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah

1. Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi tergambar bahwa perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, capaian terkait indikator di beberapa indikator telah mencapai target, kecuali terkait indikator Cakupan Petugas Satlinmas dan Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran yang masih belum mencapai target. Koordinasi dan sinergi program dengan kabupaten / kota serta kementerian telah dilakukan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019.
2. Adapun permasalahan dan hambatan keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal.
 - b. Minimnya dukungan stakeholder dalam mencapai target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
 - c. Ketersediaan Sumber Daya yang belum memadai.
3. Dengan belum tercapainya kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagaimana yang ditargetkan berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Jambi Mantap 2024 terutama terkait pemenuhan petugas Satlinmas dan Pemenuhan Respons Time Rate daerah layanan WMK.
4. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan pelayanan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Perbaikan proses perencanaan melalui penggunaan aplikasi yang dapat mendorong pencapaian tujuan yang lebih efektif.

- b. Peningkatan kinerja pelayanan melalui perbaikan yang berkesinambungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
 - c. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang semakin efektif.
5. Adapun formulasi isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang dapat dilakukan, antara lain adalah :
- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan Ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Antisipasi dini terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 baik sebelum, pada saat dan sesudah.
 - c. Peningkatan Sumber Daya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pencegahan Kebakaran.
 - d. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal

Terkait dengan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024 telah dilakukan perbandingan dengan analisis kebutuhan berdasarkan saran dan masukan baik pada saat pelaksanaan verifikasi oleh Bappeda Provinsi Jambi maupun saran dan masukan pada pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2023 terhadap Ranwal Renja Tahun 2024.

Penjelasan temuan – temuan dan catatan – catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal dapat dilihat pada tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2024 Provinsi Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				32.153.816.683	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				32.977.816.683	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	Indek Kepuasan Masyarakat Predikat AKIP	A BB	25.434.607.405	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	Indek Kepuasan Masyarakat Predikat AKIP	A BB	25.434.607.405	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Pemenuhan komponen SAKIP	100%	283.699.355	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Pemenuhan komponen SAKIP	100%	283.699.355	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	98.562.300	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	98.562.300	
	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.	1 dokumen	5.037.500	Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.	1 dokumen	5.037.500	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen	4.969.800	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	1 dokumen	4.969.800	

			dokumen Perubahan RKA-SKPD					dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.073.600	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	7.073.600	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.607.400	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.607.400	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	4 laporan	7.453.055	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	4 laporan	7.453.055	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	153.995.700	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	153.995.700	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	21.822.165.350	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	21.822.165.350	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2408 orang	21.646.638.550	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2408 orang	21.646.638.550	
	Pelaksanaan	Provinsi	Jumlah dokumen	12	156.530.000	Pelaksanaan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen	12	156.530.000	

	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jambi	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dukumen		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dukumen		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	4.858.300	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	4.858.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	3.081.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	3.081.600	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 dokumen	5.853.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 dokumen	5.853.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD.	2 laporan	2.719.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD.	2 laporan	2.719.200	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.484.700	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.484.700	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	229.478.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	229.478.000	
	Pengadaan pakaian	Provinsi	Jumlah paket	180	117.000.000	Pengadaan pakaian	Provinsi Jambi	Jumlah paket	180	117.000.000	

	dinas beserta atribut kelengkapannya	Jambi	pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket		dinas beserta atribut kelengkapannya		pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	35.000.000.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	35.000.000.	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jambi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	45.831.600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jambi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	45.831.600	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	31.646.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	31.646.400	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi umum	100%	983.457.350	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi umum	100%	983.457.350	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	31.006.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	31.006.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	70.986.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	70.986.600	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi Jambi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	117.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi Jambi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	117.000.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket bahan logistik	1 paket	64.485.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket bahan logistik	1 paket	64.485.000	

			kantor					kantor			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Jambi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	65.525.850	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Jambi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	65.525.850	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	634.453.900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	634.453.900	
5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Jambi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	871.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Jambi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	871.000.000	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 unit	530.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 unit	530.000.000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi Jambi	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	156.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi Jambi	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	156.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 unit	185.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 unit	185.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	Pemenuhan jasa kantor	100%	377.508.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	Pemenuhan jasa kantor	100%	377.508.750	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	195.595.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	195.595.200	
	Penyediaan jasa	Provinsi	Jumlah laporan	1 laporan	181.913.550	Penyediaan jasa	Provinsi Jambi	Jumlah laporan	1 laporan	181.913.550	

	pelayanan umum kantor	Jambi	penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			pelayanan umum kantor		penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	867.298.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	867.298.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan atau dibayarkan pajaknya.	49 Unit	620.554.950	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan atau dibayarkan pajaknya.	49 Unit	620.554.950	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	49.243.650	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	49.243.650	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	2 unit	197.500.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	2 unit	197.500.000	
II.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Provinsi Jambi	- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	6.461.164.778	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Provinsi Jambi	- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	6.461.164.778	
			- Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%				- Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%		
			- Cakupan petugas Satlinmas	18.200 org				- Cakupan petugas Satlinmas	18.200 org		
8.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani	100%	6.012.709.778	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Provinsi Jambi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani	100%	6.012.709.778	

	Provinsi					Provinsi					
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Provinsi Jambi	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan.	kasus	4.548.207.088	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Provinsi Jambi	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan.	kasus	4.548.207.088	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Jambi	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	kasus	220.536.500	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Jambi	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	kasus	220.536.500	
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas tingkat provinsi	1 dokumen	103.042.238	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas tingkat provinsi	1 dokumen	103.042.238	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	300.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	300.000.000	
	Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	Jumlah SDM satpol	135	300.000.000	Peningkatan Kapasitas	Kab/Kota	Jumlah SDM satpol	135	300.000.000	

	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	dalam Provinsi Jambi	pp Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya.	Orang		SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	dalam Provinsi Jambi	pp Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya.	Orang		
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 dokumen	149.987.238	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 dokumen	149.987.238	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Jambi	Jumlah sarana prasarana dan ketertiban umum yang tersedia	unit	222.922.238	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Jambi	Jumlah sarana prasarana dan ketertiban umum yang tersedia	unit	222.922.238	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	7 dokumen	99.142.238	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	7 dokumen	99.142.238	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Provinsi Jambi	Jumlah laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.	1 Laporan	68.872.238	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Provinsi Jambi	Jumlah laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.	1 Laporan	68.872.238	
9.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Persentase pelanggar perda dan perkada yang ditegakkan	100%	300.240.000	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten /Kota	Persentase pelanggar perda dan perkada yang ditegakkan	100%	300.240.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan	1 laporan	85.240.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan	1 laporan	85.240.000	

			peraturan daerah dan peraturan gubernur					peraturan daerah dan peraturan gubernur			
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	1 laporan	150.000.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	1 laporan	150.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai SOP	1 laporan	65.000.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten /Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai SOP	1 laporan	65.000.000	
10.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kabupaten /Kota	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas dan karir PPNS	3 kegiatan	148.215.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kabupaten /Kota	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas dan karir PPNS	3 kegiatan	148.215.000	
	Pengembangan Kapasitas Dan Karir PPNS	Kabupaten /Kota/ Puskreskrim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda	1 laporan	98.215.000	Pengembangan Kapasitas Dan Karir PPNS	Kabupaten /Kota /Puskreskrim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda	1 laporan	98.215.000	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang	Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyelidikan atas pelanggaran perda, jumlah perkara yang	15 Dokumen	50.000.000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang	Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyelidikan atas pelanggaran perda, jumlah perkara yang	15 Dokumen	50.000.000	

	Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		dapat disidangkan ditempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP secara operasional sudah aktif			Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS		dapat disidangkan ditempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP secara operasional sudah aktif			
III.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Provinsi Jambi	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	258.044.500	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Provinsi Jambi	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	1.082.044.500	
11	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Jambi	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran	100%	258.044.500	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Jambi	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran	100%	1.082.044.500	
	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen informasi daerah (kabupaten/kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	1 dokumen	86.011.100	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen informasi daerah (kabupaten/kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	1 dokumen	86.011.100	
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	59.066.000	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	59.066.000	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan	1 dokumen	52.706.400	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan	1 dokumen	52.706.400	

	Penyelamatan Non Kebakaran		kebakaran dan penyelamatan			Penyelamatan Non Kebakaran		kebakaran dan penyelamatan			
	-	-	-	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Provinsi Jambi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan, penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	33 unit	374.000.000	
						Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota	Kab/Kota dlm Provinsi Jambi	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota	3300 org	450.000.000	
	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen yang memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	1 dokumen	60.261.000	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen yang memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	1 dokumen	60.261.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2021 – 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam membantu mewujudkan “JAMBI MANTAP 2024”, memiliki Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Sasaran, sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja;	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja.	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Predikat AKIP
2.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya Stabilitas Tibumtranmas dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah.	1. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 2. Cakupan petugas Satlinmas 3. Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan
3.	Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial	Meningkatnya Kesiapsiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Daerah Rawan Kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sesuai Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Sasaran dan hasil pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 yang lalu yang relatif belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan, maka terhadap program dan kegiatan yang diusulkan pada Tahun 2024 dilakukan kajian, telaahan termasuk juga saran dan

masukan dari pemangku kepentingan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten / Kota serta Organisasi Perangkat Daerah dan Dinas Instansi Provinsi yang terkait pada pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Usulan program dan kegiatan juga telah dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024, misalnya isu terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang merupakan salah satu prioritas program Jambi MANTAP Tahun 2024 serta isu terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Maka Usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana tabel T-C.32.

Tabel T-C.32
Usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Provinsi Jambi	Indek Kepuasan Masyarakat Predikat AKIP	A BB	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Pemenuhan komponen SAKIP	100%	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.	1 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	4 laporan	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100%	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2408 orang	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD.	2 laporan	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Provinsi Jambi	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	180 paket	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Jambi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 orang	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Jambi	Persentase pelayanan administrasi umum	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Provinsi Jambi	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi Jambi	Jumlah paket bahan logistik kantor	1 paket	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Jambi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	
5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Jambi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	2 unit	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Provinsi Jambi	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 unit	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	Pemenuhan jasa kantor	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Provinsi Jambi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Jambi	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Jambi	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan atau dibayarkan pajaknya.	49 Unit	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Provinsi Jambi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	2 unit	
II.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Provinsi Jambi	- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	
			- Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	
			- Cakupan petugas Satlinmas	18.200 org	
8.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani	100%	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Provinsi Jambi	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan.	kasus	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Jambi	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	kasus	
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas tingkat provinsi	1 dokumen	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab/Kota dalam Provinsi Jambi	Jumlah SDM satpol pp Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya.	135 Orang	

	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 dokumen	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Jambi	Jumlah sarana prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	unit	
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	7 dokumen	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Provinsi Jambi	Jumlah laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.	1 Laporan	
9.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditegakkan	100%	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	1 laporan	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	1 laporan	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai SOP	1 laporan	
10.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas dan karir PPNS	3 kegiatan	
	Pengembangan Kapasitas Dan Karir PPNS	Kabupaten / Kota / Puskreskrim	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda	1 laporan	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyelidikan atas pelanggaran perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan ditempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP secara operasional sudah aktif	15 Dokumen	
III.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Provinsi Jambi	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	
11	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Jambi	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran	100%	
	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen informasi daerah (kabupaten/kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	1 dokumen	
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan	
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	1 dokumen	

	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Provinsi Jambi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan, penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	33 unit	
	Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota	Kab/Kota dlm Provinsi Jambi	Jumlah aparatur kebakaran yang mengikuti Bimtek pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota	3300 org	
	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Provinsi Jambi	Jumlah dokumen yang memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	1 dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementrian Dalam negeri dalam RPJMN (2020-2024) adalah “*Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kementrian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah

yang akuntaabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan *penyelenggaraan trantibumlinmas*

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran mendukung pencapaian misi ketiga. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah tujuan 1: Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sedangkan sasarannya adalah sasaran 4, yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kementrian Dalam Negeri tercantum pada tabel 18 berikut ini.

Tabel 3.1.

Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3 : Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektifitas penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas belum optimal Masih terjadinya 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran terkait penerapan SPM belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan penerapan SPM

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan <i>penyelenggaraan trantibumlinmas</i>	<p>demo yang berakhir anarkhis yang berdampak pada penurunan Indeks Demokrasi Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya dukungan anggaran untuk penerapan SPM Trantibumlinmas • Terbatasnya SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan trantibumlinmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya regulasi terkait penyelenggaraan trantibumlinmas.
	Tujuan 1 : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa			
	Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas			

III.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

III.2.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program dan kegiatan.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
3. Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial.

III.2.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasarannya diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, dan;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN						Target akhir Renstra (2026)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
Terwujudnya reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	A	A	A	A	A	A	A	A
		Predikat AKIP	Indeks	B	B	BB	BB	BB	A	A	A
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,02	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan petugas satlinmas	orang	13.109	15.620	17.150	18.200	19.600	22.000	23.430	23.430
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	59,1	100	100	100	100	100	100	100
Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial	Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	76,97	100	100	100	100	100	100	100

III.3. Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja dengan indikator sasaran ; 1) Indek Kepuasan Masyarakat 2) Predikat AKIP.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan antara lain :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD.
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

SKPD.

- e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.
 - g. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
 - d. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - e. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - f. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, dengan Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 - h. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c. Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor
 - d. Pengadaan meubel
 - e. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - f. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan pelayanan umum kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - d. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sasarannya adalah Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah dengan indikator sasaran ; 1) Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 2) Cakupan petugas satlinmas, dan 3) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas daerah Kabupaten / Kota Dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan antara lain :
 - a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - c. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi.
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azasi Manusia
 - f. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - g. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
 - h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - i. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - b. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan

Daerah dan Peraturan Gubernur.

- c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS
 - b. Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak Perda, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS

III. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran bertujuan untuk Terpenuhinya standar pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada prasarana, sarana dan utilitas umum dan sosial, sasarannya adalah Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran, dengan indikator sasaran Pemenuhan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan :

- 1. Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran, dengan Sub Kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.
 - b. Penyusunan dan pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
 - c. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
 - d. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan , antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan

kebakaran dan alat pelindung diri.

- f. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
- g. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi.
- h. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia / penyelamatan dan evakuasi.
- i. Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran provinsi dan kabupaten / kota.
- j. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- k. Penyelenggaraan sitem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
- l. Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Perangkat daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mengusulkan 3 (tiga) program, 11 kegiatan, dan 50 (Lima puluh) sub kegiatan, namun pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 menjadi 3 (tiga) program, 11 kegiatan, dan 52 (Lima puluh dua) sub kegiatan sehingga dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan diharapkan adanya peningkatan kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, diusulkan sebesar Rp. 32.977.816.683,- sebagaimana matrik berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar				32.977.816.683				35.926.516.768
01.05	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				32.977.816.683				35.926.516.768
01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Provinsi Jambi	Nilai SAKIP BB	25.434.607.405			Nilai SAKIP BB	27.015.428.718
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan komponen SAKIP	Provinsi Jambi	100%	283.699.355	APBD		100%	351.202.500
1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Provinsi Jambi	2 dokumen	98.562.300	APBD		2 dokumen	75.418.900
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.	Provinsi Jambi	1 dokumen	5.037.500	APBD		1 dokumen	5.978.200
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi Jambi	1 dokumen	4.969.800	APBD		1 dokumen	5.678.200
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Provinsi Jambi	1 dokumen	7.073.600	APBD		1 dokumen	8.122.750
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi Jambi	1 dokumen	6.607.400	APBD		1 dokumen	7.650.750
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Jambi	4 laporan	7.453.055	APBD		3 laporan	16.960.250
1.05.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Provinsi Jambi	5 laporan	153.995.700	APBD		4 laporan	231.393.450

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Provinsi Jambi	100%	21.822.165.350	APBD		100%	23.487.350.593
1.05.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Provinsi Jambi	2408 orang	21.646.638.550	APBD		177 org	23.163.116.043
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Jambi	12 dokumen	156.530.000	APBD		12 dokumen	250.410.000
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi Jambi	12 dokumen	4.858.300	APBD		12 dokumen	12.677.500
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Provinsi Jambi	1 laporan	3.081.600	APBD		1 laporan	16.462.600
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Provinsi Jambi	4 dokumen	5.853.000	APBD		4 dokumen	13.646.300
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD.	Provinsi Jambi	2 laporan	2.719.200	APBD		2 laporan	15.795.400
1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Jambi	1 dokumen	2.484.700	APBD		1 dokumen	15.242.750
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	Provinsi Jambi	100%	229.478.000	APBD		100%	372.929.475
1.05.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Provinsi Jambi	180 paket	117.000.000	APBD		177 paket	245.808.000
1.05.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi Jambi	1 dokumen	35.000.000.	APBD		1 dokumen	38.021.875
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Provinsi Jambi	25 orang	45.831.600	APBD		25 orang	52.706.300
1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Jambi	50 Orang	31.646.400	APBD		50 Orang	36.393.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	Provinsi Jambi	100%	983.457.350	APBD		100%	1.059.526.500
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Provinsi Jambi	4 paket	31.006.000	APBD		4 paket	38.757.500
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Provinsi Jambi	1 paket	70.986.600	APBD		1 paket	81.634.550
1.05.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Provinsi Jambi	1 paket	117.000.000	APBD		1 paket	60.000.000
1.05.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Provinsi Jambi	1 paket	64.485.000	APBD		1 paket	74.157.800
1.05.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Provinsi Jambi	1 paket	65.525.850	APBD		1 paket	75.354.750
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Jambi	1 laporan	634.453.900	APBD		1 laporan	729.621.900
1.05.01.1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Jambi	100%	871.000.000	APBD		100%	435.000.000
1.05.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Provinsi Jambi	2 unit	530.000.000	APBD		1 paket	185.000.000
0621.05.01.1.07.06	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Provinsi Jambi	4 unit	156.000.000	APBD		4 unit	175.000.000
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Provinsi Jambi	8 unit	185.000.000	APBD		7 unit	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa kantor	Provinsi Jambi	100%	377.508.750	APBD		100%	497.234.500
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Provinsi Jambi	1 laporan	195.595.200	APBD		1 laporan	256.674.500
1.05.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Provinsi Jambi	1 laporan	181.913.550	APBD		1 laporan	240.560.000
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Provinsi Jambi	100%	867.298.600	APBD		100%	812.185.150
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan atau dibayarkan pajaknya.	Provinsi Jambi	49 Unit	620.554.950	APBD		49 Unit	620.554.950
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Provinsi Jambi	30 unit	49.243.650	APBD		30 unit	56.630.200
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehabilitasi	Provinsi Jambi	2 unit	197.500.000	APBD		2 unit	135.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Provinsi Jambi	100%	6.461.164.778	APBD		100%	7.842.486.750
		- Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%				100%	
		- Cakupan petugas Satlinmas		18.200 org				19.600 org	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani	Provinsi Jambi	100%	6.012.709.778	APBD		100%	7.257.196.750
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan.	Provinsi Jambi	kasus	4.548.207.088	APBD		kasus	5.316.563.300
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Provinsi Jambi	kasus	220.536.500	APBD		kasus	400.633.450
1.05.02.1.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan trantibum linmas tingkat provinsi	Provinsi Jambi	1 dokumen	103.042.238	APBD		1 dokumen	110.000.000
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kabupaten / Kota se-Provinsi Jambi	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	500.000.000
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satpol pp Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya.	Kabupaten / Kota se-Provinsi Jambi	135 Orang	300.000.000	APBD		100 Orang	300.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Provinsi Jambi	1 dokumen	149.987.238	APBD		dokumen	225.000.000
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang tersedia	Provinsi Jambi	unit	222.922.238	APBD		unit	200.000.000
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	Provinsi Jambi	7 dokumen	99.142.238	APBD		3 dokumen	75.000.000
1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani.	Provinsi Jambi	1 Laporan	68.872.238	APBD		1 Laporan	130.000.000
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang ditegakkan	Kabupaten /Kota	100%	300.240.000	APBD		100%	398.040.000
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Kabupaten /Kota	1 laporan	85.240.000	APBD		1 laporan	111.040.000
1.05.02.1.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Kabupaten /Kota	1 laporan	150.000.000	APBD		1 laporan	187.000.000
1.05.02.1.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur sesuai SOP	Kabupaten /Kota	1 laporan	65.000.000	APBD		1 laporan	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas dan karir PPNS	Kabupaten /Kota	3 kegiatan	148.215.000	APBD		3 kegiatan	187.250.000
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Dan Karir PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda	Kabupaten /Kota/Pusdikreskrim	1 laporan	98.215.000	APBD		1 laporan	112.250.000
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah dokumen pemberkasan hasil penyelidikan atas pelanggaran perda, jumlah perkara yang dapat disidangkan ditempat dan sekretariat PPNS di Satpol PP secara operasional sudah aktif	Kabupaten /Kota	15 Dokumen	50.000.000	APBD		15 Dokumen	75.000.000
01.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Provinsi Jambi	100%	1.082.044.500	APBD		100%	1.068.601.300
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran	Provinsi Jambi	100%	1.082.044.500	APBD		100%	1.068.601.300
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan pemuktahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Jumlah Dokumen informasi daerah (kabupaten/kota) rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran yang sah dan legal	Provinsi Jambi	1 dokumen	86.011.100	APBD		1 dokumen	163.601.300
1.05.04.1.01.03	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Jambi	1 laporan	59.066.000	APBD		1 laporan	170.000.000
1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Provinsi Jambi	1 dokumen	52.706.400	APBD		1 dokumen	85.000.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan, penanggulangan kebakaran serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	Provinsi Jambi	33 unit	374.000.000	APBD		20 unit	400.000.000
	Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota	Jumlah aparaturnya kebakaran yang mengikuti Bimtek pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten / Kota	Kab/Kota dlm Provinsi Jambi	3300 org	450.000.000	APBD		200 org	175.000.000
1.05.04.1.01.12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah dokumen yang memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Provinsi Jambi	1 dokumen	60.261.000	APBD		1 dokumen	75.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2024 ini adalah merupakan rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi pada Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2021– 2026, RPJMD Provinsi Jambi 2021 - 2026 yang memuat Visi Jambi JAMBI MANTAP (JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH LINDUNGAN ALLAH SWT), yang mana Program, kegiatan dan Sub kegiatan disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor : 050/3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Jambi dan disempurnakan melalui Forum Perangkat Daerah dan merupakan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024.

Demikian dan terima kasih.

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19661229 198512 1 001